

BAB II

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH SEBELUM KEMUNCULAN ISIS

Pada Bab II ini penulis akan membahas tentang politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah pada masa sebelum kemunculan ISIS yaitu bagaimana orientasi Amerika Serikat pada masa Perang Dingin adalah untuk menanamkan pengaruhnya di dunia lebih besar dari musuh Amerika Serikat yaitu Uni Soviet. Bab ini akan menjelaskan bagaimana Amerika Serikat menanamkan pengaruhnya di Timur Tengah pada masa perang dingin dimana saat itu di Timur Tengah terjadi Perang Teluk antara Irak melawan Iran dan bagaimana politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Suriah pada masa perang dingin.

Kemudian akan dijelaskan juga politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah pada masa setelah berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia dimana pada masa itu terjadi berbagai macam dinamika yang mempengaruhi bagaimana Amerika Serikat dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya terhadap Timur Tengah seperti tragedi serangan teroris 9/11 di New York, Amerika Serikat yang mengawali invasi Amerika Serikat di Afghanistan hingga terjadinya perang di Irak dan Afghanistan hingga pada saat terjadinya Perang Sipil di Suriah.

A. Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Timur Tengah ketika Perang Dingin

Timur Tengah secara geografis terletak di benua Asia dan merupakan wilayah tempat pusat dari tiga agama besar dunia yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Selain itu, wilayah Timur Tengah merupakan wilayah yang memiliki jumlah cadangan minyak yang besar sehingga hal tersebut menyebabkan Amerika Serikat memusatkan politik luar negerinya ke Timur Tengah karena kebutuhan minyak Amerika Serikat yang sangat banyak (US Energy Information Administration, 2019).

Amerika Serikat membuktikan keseriusannya dalam memfokuskan politik luar negerinya di Timur Tengah bahkan sejak sebelum Perang Dingin dimulai dengan mengembangkan operasi eksplorasi minyak di Timur Tengah. Sejak tanggal 29

Mei 1933, salah satu perusahaan minyak asal California, Amerika Serikat, *Standart Oil Company* mendapatkan izin untuk melakukan eksplorasi minyak di Timur Tengah selama 60 tahun (Jatmika, Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah, 2014).

Ketika perang dunia kedua berkecamuk pada tahun 1945, Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt menyadari betapa pentingnya menjaga pasokan minyak dari timur tengah. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kepentingan dan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah Presiden Roosevelt membangun sebuah pangkalan militer di Dhahran, Arab Saudi (Herring, 2014).

Perhatian utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada era perang dingin adalah untuk meminimalisir pengaruh Soviet di dunia internasional, termasuk Timur Tengah. Fokus Amerika Serikat di Timur Tengah adalah mempertahankan bahkan mengembangkan akses untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Minyak menjadi salah satu aspek terpenting yang harus dilindungi Amerika Serikat, tanpa minyak, besar kemungkinan bahwa pasukan Amerika Serikat akan di non-aktifkan.

Untuk mencapai kepentingan ini, Amerika Serikat menanamkan dua doktrin yang dijadikan landasan dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya, yaitu :

1. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas;
2. Mencari negara-negara di Timur Tengah untuk dijadikan negara yang pro-Amerika dengan tujuan mengendalikan ekspansi pengaruh Soviet

Amerika Serikat pertama kali mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah pada saat tahun 1950 ketika terjadi ketegangan antara Arab dengan Israel. Amerika Serikat berusaha untuk mempertahankan status quo dengan mempromosikan stabilitas dengan cara menghindari perang regional.

Timur Tengah merupakan wilayah yang rawan akan konflik, para pembuat kebijakan menganggap hal tersebut dapat menjadi sasaran empuk bagi Soviet untuk menanamkan pengaruhnya di Timur Tengah. Dengan doktrin yang ditanamkan Amerika Serikat di Timur Tengah, diharapkan dapat menjadi

kontrol terhadap ekspansi Soviet di Timur Tengah (Beaver, Beaver, & Wilsey, 1999).

1. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Perang Teluk Irak-Iran (1980)

Ketika Perang Dingin berlangsung pada tahun 1980 antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, terjadi perang teluk antara Iran dengan Irak di Timur Tengah yang muncul karena terjadi konflik perbatasan. Amerika Serikat tidak merestui baik Iran maupun Irak yang saling memperebutkan wilayah teluk sehingga dapat menguasai minyak di kawasan tersebut.

Melihat situasi Iran yang dipimpin oleh Diktator Ayatollah Khomeini yang selama perang acap kali menyandera bahkan menyiksa beberapa diplomat Amerika Serikat dan situasi saat itu pun Irak berada di ambang kemenangan sehingga kemudian Amerika Serikat berpihak kepada Irak selama perang tersebut berlangsung (Riedel, 2013). Hal itu dapat dilihat ketika Amerika Serikat memberi bantuan kepada Irak. Amerika Serikat memberikan berbagai macam bantuan seperti memberi Irak berbagai macam info intelijen tingkat tinggi dan memberi senjata-senjata perang buatan Amerika Serikat kepada Irak.

Revolusi Iran yang menggulingkan kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlevi yang notabene rezim Shah Muhammad Reza Pahlevi merupakan rezim yang didukung Amerika Serikat kemudian menjadikan Iran dipimpin rezim Ayatollah Ruhollah Khomeini dengan sistem pemerintahan Islam yang terjadi satu tahun sebelum perang juga menjadi alasan yang menyebabkan posisi Amerika Serikat dalam mendapatkan minyak dari Timur Tengah terancam karena Iran merupakan salah satu negara pengekspor minyak sehingga dibawah kekuasaan diktator Khomeini dengan sistem pemerintahan Islam nya tentu akan menghambat kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah sehingga Amerika Serikat memberi banyak bantuan kepada Irak untuk mengalahkan Iran (Haass, 1996).

2. Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Suriah (1950)

Ketika perang dingin berlangsung pada pertengahan tahun 1950, Suriah menjadi salah satu negara Timur Tengah yang pro-Soviet. Hubungan antara Amerika Serikat dengan Suriah tidak terlalu baik pada era perang dingin. Bahkan, Presiden Eisenhower pernah berpidato untuk menyebarkan doktrinnya yang berjudul "*Special Message to the Congress on the Situation in the Middle East*" yang bermaksud untuk mengajak negara Timur Tengah untuk meminta bantuan Amerika Serikat baik secara ekonomi maupun bantuan militer jika negaranya sedang dalam kondisi terancam oleh agresi senjata dari negara lain, bahkan Eisenhower menyebutkan khususnya dari Uni Soviet dan kemudian Suriah secara langsung menolak doktrin dari Eisenhower tersebut (Beaver, Beaver, & Wilsey, 1999)

B. Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah Pasca Perang Dingin

Pada tahun yang sama ketika berakhirnya perang dingin, situasi di Timur Tengah tetap memanas, pada jam 5 pagi warga Kuwait dikagetkan dengan kedatangan tank-tank Irak yang dikirim Saddam Husein. Pasukan militer Irak telah berkumpul di wilayah perbatasan Kuwait karena Saddam Husein menuduh Kuwait telah mencuri minyak di wilayah Irak. Amerika Serikat awalnya telah menawarkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai tetapi Irak tetap saja melanjutkan invasinya ke Kuwait sehingga menimbulkan perang (Cristol, 2018).

1. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Perang Teluk Irak-Kuwait (1990)

Suasana kondusif pasca perang teluk antara Iran dengan Irak yang berlangsung selama 8 tahun dan berakhir pada tahun 1988 hanya berlangsung sebentar. Pada tahun 1990 perang di kawasan teluk kembali pecah antara Irak dengan Kuwait. Perang yang disebabkan oleh faktor ekonomis tersebut diawali ketika Irak yang sedang dalam kondisi perekonomian yang baik karena ekspor minyaknya yang berjalan dengan sangat baik harus menghadapi

penurunan harga minyak yang menyebabkan pendapatan Irak menurun secara drastis karena Kuwait yang diduga Irak telah berkerjasama dengan barat yang kemudian memutuskan untuk menurunkan harga ekspor minyak dari negaranya (Hasan, 2019).

Hal tersebut kemudian memicu Saddam Husein untuk meminta kompensasi kepada Kuwait tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Kuwait. Kemudian, Saddam Husein menuduh Kuwait telah mencuri minyak Irak dari daerah Rumala. Tetapi hal tersebut hanya dianggap Kuwait sebagai alasan Irak untuk melegitimasi intervensi militer (Hasan, 2019).

Pada bulan Agustus 1990 Irak dibawah pimpinan Saddam Husein menginvasi Kuwait dengan menurunkan 300.000 pasukan militer di Kuwait. Kemudian pada bulan yang sama juga, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memerintahkan Irak untuk menarik pasukannya dari Kuwait tetapi tidak diindahkan oleh Irak yang menyebabkan DK PBB kemudian menerapkan embargo perdagangan kepada Irak (Cristol, 2018).

Amerika Serikat juga menuduh Saddam Husein sedang mengembangkan senjata nuklir sehingga pada tahun 1991 Amerika Serikat beraliansi dengan NATO membentuk suatu pasukan gabungan koalisi anti-Irak yang bermarkas di Arab Saudi yang kemudian melaksanakan Operasi Badai Gurun (*Desert Storm Operation*) dan berperang selama 42 hari dengan strategi menyerang pusat listrik dan air Irak. Bahkan Pasukan Operasi Badai Gurun sempat menyerang pasukan Irak selama 100 jam yang menewaskan 200.000 pasukan Irak dan kemudian pada akhirnya operasi tersebut berhasil mengusir Irak dari Kuwait (Holland, 2018).

2. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pasca Tragedi 9/11

Pada tanggal 11 September 2001, gedung kembar *World Trade Centre* (WTC) di New York, Amerika Serikat diserang oleh 19 militan organisasi teroris Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden yang membajak 4 pesawat. Satu

pesawat yang dibajak teroris Al-Qaeda juga ditabrakan ke gedung Pentagon, salah satu gedung yang diklaim paling aman di Amerika Serikat. Tragedi ini menewaskan hampir 3.000 orang. Tragedi ini kemudian menyadarkan Amerika Serikat bahwa kekuatan Amerika Serikat di dunia terancam oleh kekuatan terorisme Islam.

Amerika Serikat kemudian memberikan perhatian lebih terhadap ancaman kelompok terorisme Islam seperti Al-Qaeda. Menurut dokumen dari Badan Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat, George Bush menanamkan tiga doktrin utama dalam menentukan fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat Pertama, mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat di dunia. Kedua, melakukan *pre-emptive attack* terhadap ancaman potensial Amerika Serikat. Ketiga, menyebarkan prinsip demokrasi liberal (Jatmika, Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah, 2014).

Tiga hari setelah tragedi 9/11, George Bush menerima sebuah otorisasi dari kongres yaitu otorisasi untuk penggunaan kekuatan militer yang kemudian memberi George Bush wewenang untuk menggunakan semua kekuatan militer untuk memusnahkan kelompok teroris Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas tragedi 9/11 dan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terulang kembali di Amerika Serikat (Cristol, 2018).

Satu bulan setelah Al-Qaeda menyerang gedung WTC di New York, Amerika Serikat, George Bush langsung mengirimkan pasukan militer ke Afghanistan. Diawali dengan menandatangani sebuah *joint resolution* untuk mengesahkan penggunaan kekuatan militer untuk menyerang pihak yang bertanggung jawab terhadap tragedi penyerangan 9/11. Dunia Internasional memberi dukungan terhadap Amerika Serikat atas aksi ini, pada 7 Oktober 2001, Amerika Serikat memulai serangan udara melalui pesawat yang menjatuhkan bom pertama di Afghanistan terhadap Taliban, rezim yang mendukung dan melindungi kelompok teroris Al-Qaeda, dengan bantuan Inggris, Kanada, Perancis, Jerman dan Australia (Council Of Foreign Relations)

Pada November 2001, tanda tanda kekalahan Taliban sudah mulai terlihat hingga PBB mengeluarkan resolusi 1378 yang menginisiasi peran sentral PBB dalam memperbaiki administrasi negara Afghanistan dan mengajak dunia internasional untuk membantu kegiatan *peacekeeping* di Afghanistan dalam melalui proses transisi. Pemimpin Al-Qaeda kemudian melarikan diri pada bulan Desember 2001 dan rezim Taliban runtuh secara total pada bulan Desember 2001 (Council Of Foreign Relations).

3. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Perang Irak.

Melakukan penggantian rezim di Timur Tengah yang tidak terlalu pro-Amerika menjadi rezim yang pro- Amerika menjadi salah satu fokus Amerika Serikat dalam memenuhi kepentingannya di Timur Tengah. Rezim Saddam Husein menjadi contoh ketika perang melawan Iran, Irak menjadi sebuah negara yang kuat setelah mendapat banyak bantuan dari Amerika Serikat.

Hingga kemudian Saddam Husein berpaling dari Amerika Serikat ketika pada tahun 2003 Presiden Amerika Serikat, George Bush menduga adanya keterlibatan Irak dalam serangan 9/11 di New York, Amerika Serikat. Dengan dalih ingin mencari dan menghancurkan senjata pemusnah massal, Sekretaris Negara saat itu, Colin Powell mengajukan kasus tersebut kepada DK PBB dan menyatakan bahwa perilaku Irak dibawah rezim Saddam Husein sedang mengembangkan senjata pemusnah massal. Membantu Irak menjadi negara demokratis juga menjadi dalih lain dari Amerika Serikat untuk melegitimasi invasi nya ke Irak karena Saddam Husein pun tidak terlalu disukai oleh masyarakat Irak. Secara resmi Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak pada bulan Maret 2003. Amerika Serikat mengirimkan sekitar 100.000 pasukan militer ke Irak (Cristol, 2018).

Invasi Amerika Serikat terhadap Irak menjadi akhir dari rezim Saddam Husein walaupun invasi hanya berlangsung selama dua bulan. Pasukan militer Amerika

Serikat berhasil menguasai kota Baghdad yang merupakan kota pusat pemerintahan Saddam Husein pada bulan April 2003. Runtuhnya kota Baghdad juga menandakan berhasilnya Pasukan Amerika Serikat beserta sekutu dalam meruntuhkan rezim Saddam Husein. Selama perang di Irak antara pasukan militer Amerika Serikat beserta sekutu melawan pasukan rezim Saddam Husein telah menjadi bencana bagi warga sipil Irak karena jumlah korban sipil yang banyak dan rusaknya berbagai fasilitas umum seperti sekolah, gedung pemerintahan dan masjid (Conneta, 2003).

Setelah rezim Saddam Husein runtuh, koalisi Amerika Serikat mengangkat Paul Bremer sebagai koordinator koalisi tersebut. Dengan cepat, Bremer langsung membubarkan kekuatan militer angkatan darat Irak dan membubarkan Partai Saddam Husein, Partai Baath dari dalam dengan cara membersihkan anggota-anggota partai Baath. Hal ini menyebabkan Partai Baath menduduki peringkat terendah di Irak. Koalisi Amerika melarang anggota Partai Baath dari pemerintahan sehingga kondisi di pemerintahan Irak saat itu hampir kosong, tidak ada yang bisa menjalankan fungsi fasilitas umum seperti listrik, air dan infrastruktur penting lainnya.

Koalisi Amerika Serikat kemudian membantu Irak untuk mencetuskan konstitusi baru di Irak. Mayoritas peran penting dalam konstitusi baru Irak yang ditawarkan Amerika Serikat diisi oleh pejabat muda Partai Republik Amerika Serikat sementara jumlah warga asli Irak yang menempati posisi di pemerintahan Irak yang baru sangat sedikit. Hal ini kemudian membuat masyarakat Irak memandang bahwa Amerika Serikat sedang menjajah dan menghancurkan pemerintahan Irak. Hal ini bertambah buruk ketika pada tanggal 28 April 2004 masyarakat Irak melihat tayangan militer Amerika Serikat sedang menyiksa tahanan Irak di Abu Ghraib (Cristol, 2018).

Hal tersebut membuat dinamika perpecahan di Irak terjadi. Berbagai kelompok militant di Irak mulai bermunculan bahkan mengambil alih beberapa sektor penting di Irak dan menguasai Kota Baghdad. Beberapa

kelompok milisi mendukung pendudukan Amerika Serikat di Irak tetapi beberapa kelompok lainnya juga menentang adanya campur tangan Amerika Serikat di Irak yang membuat koalisi Amerika Serikat menghadapi hambatan yang begitu besar. Tetapi kemudian hal tersebut direspon oleh militer Amerika Serikat bersama dengan koalisi Amerika Serikat sehingga pada puncak pemberontakan di kota Baghdad, Amerika Serikat berhasil memenangkan perang ini. Kurdi Irak kemudian berkerjasama dengan Amerika Serikat dan sukses membangun kemerdekaan secara *de facto* (Cristol, 2018).

4. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Perang Sipil Suriah

Pada tanggal 15 Maret 2011 kerusuhan pecah di Suriah dimana massa ingin meruntuhkan rezim Bashar Al-Assad. Kondisi di Suriah saat itu hampir sama dengan kondisi ketika kerusuhan di Libya, Tunisia dan Mesir yang ingin menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa. Tetapi saat itu di Suriah, massa oposisi rezim Bashar Al-Assad sedang dalam kondisi terpecah.

Amerika Serikat tidak memiliki rencana untuk terlibat langsung dalam kerusuhan ini tetapi ketika Bashar Al-Assad menggunakan senjata kimia untuk menyerang demonstran, Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama merespon dan memberikan pernyataan bahwa Amerika Serikat akan menggunakan kekuatan militernya untuk menuntut pertanggungjawaban dan mengurangi kemampuan Suriah untuk menggunakan senjata kimia lagi. Pada tanggal 11 April 2014, Suriah kembali menggunakan senjata kimianya dan kali ini respon Amerika Serikat berbeda dari yang sebelumnya. Amerika Serikat hanya mengandalkan negosiasi dengan sekutu Suriah, yaitu Rusia dalam menghapuskan program senjata kimia yang digunakan rezim Bashar Al-Assad. Amerika Serikat tidak terlalu memfokuskan politik luar negerinya terhadap Suriah, tetapi ketika ada tanda-tanda kemunculan kelompok terorisme baru di Suriah, Amerika Serikat kembali mengarahkan kebijakan luar negerinya ke Suriah (Cristol, 2018).